



BAB I PENDAHULUAN

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu dari delapan kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Di bawah kepemimpinan Bupati I Putu Artha, SE., MM dan Wakil Bupati I Made Kembang Hartawan, SE., MM berupaya sedemikian rupa untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan di segala bidang serta percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk percepatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud, berbagai program dan terobosan terlahir dari ide Bupati Jembrana dan Wakil Bupati Jembrana seperti; peningkatan kesehatan masyarakat, pendidikan, pengurangan dan pengentasan kemiskinan. Program peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menetapkan beberapa Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap, mengaktifkan kembali PUSTU dengan layanan 24 Jam. Program dibidang pendidikan dengan memberikan beasiswa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) per-Semester kepada mahasiswa asal Kabupaten Jembrana dengan Indeks Prestasi (IP) terendah 3,3, membuka komunitas Perguruan Tinggi Jurusan Pariwisata. Program pengurangan dan pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada Pokmas, Bedah rumah, melakukan pengiriman tenaga kerja keluar negeri, serta masih banyak program-program yang dilahirkan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan Bupati saat ini.

Menghadapi tantangan perekonomian daerah yang masih fluktuatif, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, serta terbatasnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Upaya menggerakkan seluruh potensi pembangunan yang ada di Kabupaten Jembrana, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.



A. Gambaran Umum

A.1 Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan semua program perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Jemberana, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 15 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jemberana, susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jemberana terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah berjumlah 10, terdiri dari :
 1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
 2. Dinas Kehutanan Perikanan dan Kelautan
 3. Dinas Pekerjaan Umum.
 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
 6. Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 8. Dinas Kesehatan
 9. Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.
 10. Dinas Pendapatan Daerah
- f. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 - l. Badan, sejumlah 3, terdiri dari;
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.
 2. Badan Kepegawaian Daerah
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Formatted: Spanish (International Sort)

Formatted: Indent: Left: 3,49 cm, No bullets or numbering



II. Kantor, sejumlah 5, terdiri dari;

1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri.
2. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
3. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
4. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

III.RSU

- g. Satuan Polisi Pamong Praja.
- g. 5 Kecamatan.
- h. 10 Kelurahan.

38 (tiga puluh delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut melaksanakan Urusan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Urusan-urusan dimaksud, dirinci dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

A.2 Geografis

Kabupaten Jembrana sebagai salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, secara geografis terletak di ujung barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur tepatnya terletak pada posisi $8^{\circ} 09'30''$ - $8^{\circ} 28'02''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ} 25' 53''$ - $114^{\circ} 56' 38''$ Bujur Timur. Permukaan bumi Kabupaten Jembrana bergelombang dan berbukit di bagian Utara, dan landai di bagian Selatan. Ketinggian wilayah Kabupaten Jembrana mencapai 306,84 meter di atas permukaan laut dengan titik tertinggi hanya 700 meter. Kabupaten Jembrana memiliki pantai sepanjang 78 km dan memiliki 37 sungai dengan panjang seluruhnya 495,8 kilometer.

Batas-batas wilayah Kabupaten Jembrana adalah:

- a. Sebelah Utara adalah Pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng



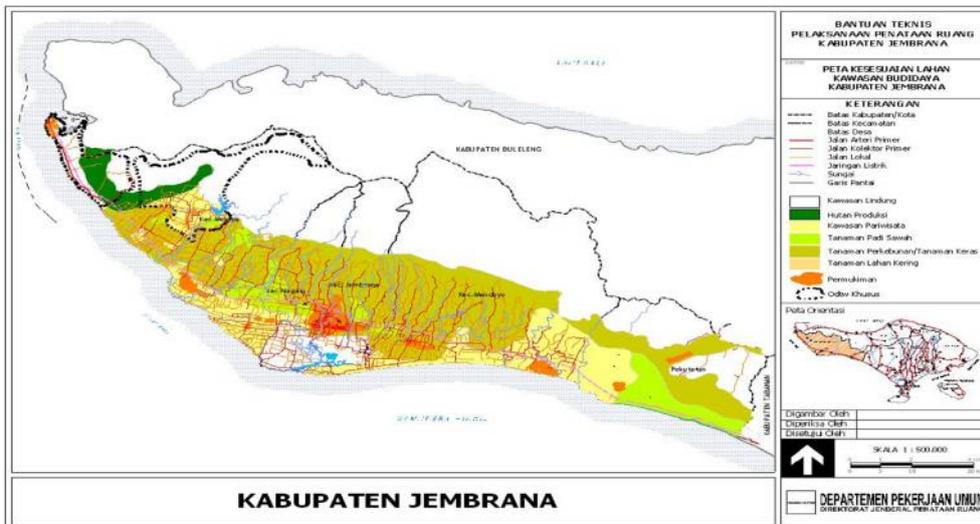
- b. Sebelah Timur adalah Kabupaten Tabanan
 - c. Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia.
 - d. Sebelah Barat adalah Selat Bali
- e.

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Left: 1,43 cm, No bullets or numbering

Formatted: Indonesian

Gambar 1.61
Peta Kabupaten Jembrana



Secara geografis Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun keluar pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kabupaten Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah Utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Propinsi NTB. Dengan demikian Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas antar kota-kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur darat. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah 841,80 Km² atau 14,93 % dari luas Propinsi Bali, terluas kedua di bawah Buleleng.



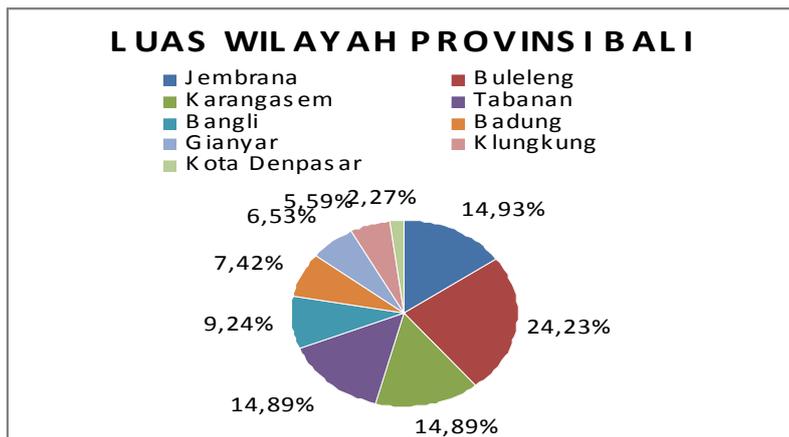
Tabel 1.71
Luas Wilayah Kab/Kota se-Provinsi Bali

No.	Luas Wilayah	Km2	%
1	Jembrana	841,80	14,93
2	Buleleng	1.365,88	24,23
3	Karangasem	839,54	14,89
4	Tabanan	839,33	14,89
5	Bangli	520,81	9,24
6	Badung	418,52	7,42
7	Gianyar	368,00	6,53
8	Klungkung	315,00	5,59
9	Kota Denpasar	127,78	2,27
	Provinsi Bali	5.636,66	100,00

Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten- Jemberana 2013

Perbandingan luas masing-masing Kabupaten dalam Provinsi Bali dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.82



Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jemberana 2014



Dengan luasan daerah yang demikian merupakan potensi yang sangat baik khususnya di sektor pertanian maupun sektor-sektor lain seperti perkebunan, perikanan, industri maupun perdagangan. Dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Jember, yang terluas adalah Kecamatan Mendoyo. Rincian luas masing-masing kecamatan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Luas Wilayah Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS	PERSENTASE
1	Melaya	197,19 km ²	23,4
2	Negara	126,60 km ²	15,0
3	Mendoyo	294,49 km ²	34,9
4	Pekutatan	129,65 km ²	15,4
5	Jember	93,87 km ²	11,2

- a. Kecamatan Melaya seluas : 197,19 km²
- b. Kecamatan Negara seluas : 126,60 km²
- c. Kecamatan Mendoyo seluas : 294,49 km²
- d. Kecamatan Pekutatan seluas : 129,65 km²
- e. Kecamatan Jember seluas : 93,87 km²

Secara administrasi Kabupaten Jember dibagi atas 5 (lima) wilayah kecamatan, 51 desa/ kelurahan dengan 207 banjar (dusun) dan 43 lingkungan. Di samping desa dinas, Kabupaten Jember juga memiliki desa Pekraman sebanyak 64 buah dengan Banjar Adat sebanyak 232 buah.

Tabel 1.93
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jember

Formatted: Indonesian

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Line spacing: single

Formatted: Centered

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Centered

Formatted: Left, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Centered

Formatted: Left, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Centered

Formatted: Left, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Centered

Formatted: Left, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Comment [d1]: tambahkan tabel persentase luas wilayah masing-masing kecamatan dan diagramnya

Formatted: Indonesian



No.	Pembagian Wilayah Administrasi	Jumlah
1	Jumlah Kecamatan	5
2	Jumlah Desa/Kelurahan	41/10
3	Jumlah Dusun/Lingkungan	207/43
34	Jumlah Desa Adat (Desa Pakraman)	64
45	Jumlah Banjar Adat	232
56	Kepadatan Jiwa Per Km2	xxxxx
67	Luas Wilayah	841,80 Km2

Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jember 2014

A.3 Dasar Hukum

~~Sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah, maka diterbitkan Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, maka diterbitkan~~ Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti/pencabut Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan/menetapkan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Petunjuk Teknis (Juknis) tersebut diatur bahwa Sistem AKIP terdiri dari 6 komponen, yakni :1) perencanaan strategis, 2) ~~perencanaan perjanjian~~ kinerja, 3) pengukuran kinerja, 4) pengelolaan data kinerja, 5) pelaporan kinerja ~~dan reviu~~, dan 6) ~~reviu dan~~ evaluasi Kinerja. Laporan ~~Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIPLKJ IP)Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)Pemerintah~~ Kabupaten Jember Tahun 2014 ini disusun untuk memenuhi komponen yang ke-5 (kelima) dari Sistem AKIP, yaitu **pelaporan kinerja**.

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Font: Arial Narrow, Indonesian

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Font: Arial Narrow, Indonesian

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Font: Arial Narrow, Indonesian

Formatted: Font: Arial Narrow

Comment [d2]: buang

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Font: Arial Narrow, Indonesian

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Font: Arial Narrow, Indonesian

Formatted: Font: Arial Narrow

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 1,27 cm



Pelaksanaan penyusunan LAKIPLKJ IP-LKj IP Pemerintah Kabupaten Jemberana dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIPLKJ IP, yaitu :

- (1) Landasan Idiil, yaitu Pancasila,
- (2) Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945,
- (3) Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



- i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- m. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 15);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 43);
- q. Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jember Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 265).
- r. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013 Nomor 480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas



Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 549);

B. Aspek Strategis

Penyusunan LAKIPLKJ IP Pemerintah Kabupaten Jember periode tahun 2014 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Pembuatan LAKIPLKJ IP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan Perencanaan Taktis Strategis, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan RPJMD selama satu tahun anggaran.

Sebagai langkah awal pembangunan yang tersusun dalam Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2011-2016, merupakan suatu proses dari rangkaian usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. VISI

Perumusan Visi Kabupaten Jember mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Kabupaten Jember, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang ada, maka bupati menetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagai Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006 -2025 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jember melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”.

Comment [d3]: tambahkan penjelasan visi, di bawah pernyataan visi



2. MISI

dalam mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Jember 2011-2016 ditetapkan 5 (lima) buah misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Berikut ini dijelaskan makna masing-masing misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga tertanam dalam pribadi masing – masing untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat.



Aspiratif, partisipatif dan transparan, mempunyai makna bahwa pemerintah peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang transparan/ terbuka.

2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jember, titik utama perhatian kita adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat, tanpa harus meninggalkan sector-sektor yang lain.

Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun sekaligus sebagai subyek/ pelaku pembangunan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi modern, serta meningkatkan aksesibilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan, sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan kemajuan zaman.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Tersedianya sarana dan prasarana publik baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik, seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lainnya. Peningkatan ketersediaan infrastruktur akan dapat mempercepat



proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas di antaranya adalah terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakkan peraturan dan adanya kepastian hukum. dengan demikian suasana kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi dan saling menjaga kerukunan diharapkan dapat terwujud.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

[Penjabaran lebih lanjut mengenai tujuan dan sasaran serta strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran secara rinci tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2011-2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2011-](#)



2016 dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2011-2016.

~~**Misi Pertama:** Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.~~

Tabel 1.1
Tujuan dan sasaran Kabupaten Jember 2011-2016
Misi Pertama

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Meningkatnya ketersediaan kerjasama pembangunan. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan. Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan. Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan ekonomi. Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan sosial budaya. Meningkatnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
2	Meningkatkan fungsi Dewan sebagai Lembaga yang aspiratif.	Meningkatnya hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat.
3	Meningkatkan layanan kepada kepala/wakil kepala daerah.	Meningkatnya koordinasi antar pemerintah.
4	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
5	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.	Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang keuangan daerah. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang aset daerah. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang pendapatan daerah.



		Meningkatnya pendapatan asli daerah.
6	Meningkatkan pengawasan kebijakan kepala daerah.	Meningkatnya capaian kinerja pemerintah dan laporan keuangan daerah. Meningkatnya sistem pengawasan Internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Meningkatnya disiplin kerja aparatur.
7	Meningkatkan penataan peraturan perundang undangan.	Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang undangan di daerah. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang undangan daerah dengan peraturan perundang undangan di atasnya. Meningkatnya frekuensi penegakkan perda.
8	Meningkatkan penataan kelembagaan.	Meningkatnya kesesuaian kelembagaan daerah dengan pemerintah pusat.
9	Meningkatkan pengelolaan aparatur daerah.	Meningkatnya ketersediaan sumber daya aparatur. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur.
10	Meningkatkan pelayanan umum perijinan.	Meningkatnya pelayanan perijinan yang tepat, cepat, benar dan transparan. Meningkatnya masyarakat yang wajib ijin.
11	Meningkatkan sistem Pengelolaan pertanahan.	Meningkatnya kepastian hukum kepemilikan dan penggunaan tanah aset daerah.

~~**Misi Kedua:** Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.~~

Tabel 1.2
Tujuan dan sasaran Kabupaten Jember 2011-2016
Misi Kedua

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan.	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan sarana transportasi. Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas. Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
2	Meningkatkan iklim investasi daerah.	Meningkatnya ketersediaan regulasi investasi daerah. Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi.
3	Meningkatkan	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.



	kualitas dan kuantitas pengelolaan koperasi dan UMKM.	Meningkatnya kewirausahaan pelaku UMKM.
4	Meningkatkan akses ketahanan pangan.	Meningkatnya ketersediaan pangan. Meningkatnya keanekaragaman sumber daya pangan.
5	Meningkatkan Kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan serta lembaga kemasyarakatannya.	Meningkatnya rasa kebersamaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Meningkatnya pelaksanaan progam/ kegiatan pemberdayaan masyarakat.
6	Meningkatkan ketersediaan data/ informasi untuk pembangunan.	Meningkatnya ketersediaan data/ informasi.
7	Meningkatkan pengelolaan komunikasi dan informatika.	Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Meningkatnya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika. Meningkatnya kerjasama informasi dan media massa.
8	Meningkatkan pengelolaan pertanian sebagai agribisnis.	Meningkatnya produktivitas pertanian. Meningkatnya produktivitas perkebunan. Meningkatnya produktivitas peternakan.
9	Meningkatkan produksi dan pelestarian tanaman hutan.	Meningkatnya pelestarian hutan. Berkurangnya rasio hutan yang rusak.
10	Melaksanakan pengembangan pariwisata budaya.	Terwujudnya promosi pariwisata. Terwujudnya penataan obyek wisata. Terwujudnya pengembangan obyek wisata baru.
11	Meningkatkan produktivitas perikanan dan kelautan.	Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap. Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya.
12	Meningkatkan kuantitas dan kualitas perindustrian.	Meningkatnya peranan sektor industri terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Jemberana. Meningkatnya kualitas teknologi IKM di kabupaten Jemberana. Berkembangnya sentra-sentra industri potensial.
13	Meningkatkan kuantitas dan kualitas perdagangan.	Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa. Meningkatnya perkembangan dan distribusi perdagangan. Meningkatnya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri.



Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.

Tabel 1.3
Tujuan dan sasaran Kabupaten Jember 2011-2016
Misi Ketiga

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sarana dan prasarana ruang belajar - Meningkatnya APK dan APM - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan
2	Meningkatkan mutu/ kualitas SDM yang professional dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas SDM masyarakat Kabupaten Jember yang terampil. - Meningkatnya kualitas aparatur Pemkab Jember dan pelayanan birokrasi kepada masyarakat.
3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya mutu, jangkauan dan system layanan masyarakat. - Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. - Meningkatnya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. - Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan.
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya pelayanan kesehatan prima yang SERASI. - Meningkatkan kepuasan pelanggan.
5	Meningkatkan pelayanan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta tertib kependudukan.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. - Terkendalinya mobilitas penduduk.
6	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. - Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. - Meningkatnya kesadaran kelompok Catur Bina.
7	Meningkatkan kualitas keluarga berencana dan sejahtera.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja. - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam KB.
8	Meningkatkan kualitas pengelolaan kesejahteraan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pemberdayaan PMKS dan komunitas adat terpencil. - Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. - Meningkatnya perlindungan dan jaminan social masyarakat.
9	Meningkatkan kualitas pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. - Meningkatnya tenaga kerja terampil yang memiliki daya



	ketenagakerjaan:	saing:
10	Meningkatkan pengembangan kebudayaan:	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya pengembangan nilai – nilai budaya. -Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya. -Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya.
11	Meningkatkan kualitas pengelolaan kepemudaan dan olahraga:	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya peran serta kepemudaan. -Meningkatnya kompetensi dan kemampuan pemuda dalam upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup. -Meningkatnya pemasyarakatan olahraga. -Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga.
12	Meningkatnya pengolahan kearsipan daerah	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya sarana prasarana kearsipan. -Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan
13	Meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan di kab. Jemberana:	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya minat baca. -Meningkatnya perpustakaan keliling. -Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan.
14	Meningkatkan pengelolaan data elektronik	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya kualitas data elektronik -Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pengelolaan data elektronik
15	Meningkatkan kualitas ketransmigrasian:	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya minat masyarakat bertransmigrasi.

Misi Keempat: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Tabel 1.4
Tujuan dan sasaran Kabupaten Jemberana 2011-2016
Misi Keempat

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana publik:	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya rasio dan jalan yang baik. -Meningkatnya saluran drainase/ gorong-gorong yang baik. -Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebina Margaan. -Meningkatnya rasio jaringan irigasi yang baik. -Meningkatnya penyediaan air baku. -Meningkatnya kinerja pengendalian banjir. -Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. -Meningkatnya kualitas infrastruktur pedesaan.
2	Meningkatkan pengelolaan perumahan:	Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat.
3	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dan wilayah:	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya ketersediaan dokumen tata ruang. -Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang. -Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang.



4	Menurunkan eksploitasi sumberdaya mineral untuk pelestarian lingkungan.	Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C.
5	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Misi Kelima: ~~Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.~~

Tabel 1.5
Tujuan dan sasaran Kabupaten Jember 2011-2016
Misi Kelima

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.	Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Terwujudnya pemerintahan daerah yang mantap. Terwujudnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2010 yang tertib, aman, damai, tertib dan lancar.
2	Meningkatkan pembangunan sistem budaya politik yang demokratis, berkedaulatan rakyat dan menghargai perbedaan dan keragaman azas.	Terwujudnya Pembekalan Teknis dan Pengenalan Dasar-dasar Linmas. Terwujudnya Bintek wawasan kebangsaan, bela Negara dan diskusi politik.
3	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat serta partisipasi aktif dan semangat gotong royong dalam penanganan penanggulangan bencana dan pengungsi.	Terwujudnya sosialisasi kesiagaan dan penanggulangan bencana alam. Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam.
4	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta	Terwujudnya masyarakat Jember yang aman, tertib dan tentram serta taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



	meningkatkan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.	
5	Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Musibah Kebakaran.	Terwujudnya masyarakat Jembrana yang dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan musibah Kebakaran.

Sumber : RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2016

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 disusun berdasarkan rumusan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait, masukan DPRD berupa pokok-pokok pikiran serta penjabaran RPJMD. Selanjutnya Arah Kebijakan Umum ini menjadi kesepakatan antara pihak Legislatif dan Eksekutif, sehingga wajib menjadi pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016.

Sedangkan Arah Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016. Adapun strategi dan arah kebijakan dari masing – masing prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016.

C. Permasalahan Utama

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak



diatasi untuk menggapai peluang dan meminimalisasi hambatan. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat

~~Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa strategi adalah langkah — langkah berisikan program — program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Jember Tahun 2011 — 2016.~~

~~Sedangkan Arah Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2011 — 2016. Adapun strategi dan arah kebijakan dari masing — masing prioritas pembangunan daerah, sebagai berikut : sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2011-2016~~

Tabel 1.6

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1

9459 BUDAYA JEMBRANA 2011-2016



“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jemberana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”.

MISI 1 (Prioritas 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi) :
Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	<p>Meningkatnya ketersediaan—kerjasama pembangunan.</p> <p>Meningkatnya pengembangan—wilayah perbatasan.</p> <p>Meningkatnya pengembangan—wilayah strategis—dan—cepat tumbuh.</p> <p>Meningkatnya kapasitas—kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>Meningkatnya ketersediaan—dokumen perencanaan pembangunan.</p> <p>Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan ekonomi.</p> <p>Meningkatnya ketersediaan perencanaan</p>	<p>Mendorong kerjasama antara pemerintah Kab. Jemberana dengan pemerintah daerah lainnya, propinsi dan pusat.</p> <p>Mendorong pengembangan—wilayah perbatasan.</p> <p>Memacu pengembangan—wilayah strategis dan cepat tumbuh.</p> <p>Mengoptimalkan kapasitas—kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>Mengoptimalkan sumber—daya perencanaan pembangunan.</p> <p>Mengoptimalkan sumber—daya perencanaan pembangunan.</p> <p>Mengoptimalkan sumber—daya perencanaan</p>	<p>Penguatan—partisipasi pemangku kepentingan</p> <p>Pengembangan—wilayah perbatasan dengan memadukan kepentingan bersama</p>



MISI 1 (Prioritas 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi) : Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	<p>pembangunan sosial budaya.</p> <p>Meningkatnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.</p> <p>Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.</p>	<p>pembangunan.</p> <p>Mengoptimalkan sumber daya perencanaan pembangunan.</p> <p>Mengoptimalkan sumber daya perencanaan pembangunan.</p>	
<p>Meningkatkan fungsi Dewan sebagai Lembaga yang aspiratif.</p>	<p>Meningkatnya hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.</p> <p>Tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat.</p>	<p>Mendorong penjangkasan aspirasi masyarakat</p>	<p>Keterbukaan informasi publik</p>
<p>Meningkatkan layanan kepala/wakil kepala daerah.</p>	<p>Meningkatnya koordinasi antar pemerintah.</p>	<p>1. Singkronisasi prioritas program</p> <p>2. Mendorong layanan prima</p>	<p>Harmonisasi hubungan antar pemerintahan.</p>



MISI 1 (Prioritas 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi) : Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	Penguatan regulasi pedoman kerja.	Reformasi birokrasi.
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.	Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang keuangan daerah. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang aset daerah. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang pendapatan daerah. Meningkatnya pendapatan asli daerah	Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel, transparan, bersih dan bebas-KKN
Meningkatkan pengawasan kebijakan kepala daerah.	Meningkatnya capaian kinerja pemerintah dan laporan keuangan daerah. Meningkatnya sistem pengawasan Internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Meningkatnya disiplin kerja aparatur	Pengembangan dan penerapan Sistem Pengawasan Internal.	Penyusunan SOP masing-masing program pada SKPD lingkup Kab. Jember.



MISI 1 (Prioritas 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi) : Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan penataan peraturan perundang undangan.	Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang undangan di daerah. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang undangan daerah dengan peraturan perundang undangan di atasnya. Meningkatnya frekuensi pengakkan perda.	Regulasi dan harmonisasi peraturan daerah.	1. Penyiapan Perda. 2. Penegakan Perda.
Meningkatkan penataan kelembagaan.	Meningkatnya kesesuaian kelembagaan daerah dengan Peraturan Perundang undangan.	Mendorong Harmonisasi kelembagaan.	Optimalisasi tugas fungsi kelembagaan.
Meningkatkan pengelolaan aparatur daerah.	Meningkatnya ketersediaan sumber daya aparatur. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur.	1. Rekrutmen aparatur. 2. Mendorong kinerja aparatur.	Rekrutmen dan Penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahlian.
Meningkatkan pelayanan umum perijinan.	Meningkatnya pelayanan perijinan yang tepat, cepat, benar dan	Layanan yang mudah dan berstandar.	Menyederhanakan proses dan persyaratan



<p>MISI 1 (Prioritas 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi) : Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	transparan. Meningkatnya masyarakat yang wajib ijin.	Kebijakan : menyederhanakan proses dan persyaratan perijinan.	perijinan.
Meningkatkan sistem Pengelolaan pertanahan.	Meningkatnya kepastian hukum kepemilikan dan penggunaan tanah aset daerah.	Tertib hukum pengelolaan aset pertanahan daerah.	Sosialisasi dan fasilitasi administrasi pertanahan.

Tabel 1.7
Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2

<p>MISI 2 (Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing Ekonomi) : Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan.	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan sarana transportasi. Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas. Meningkatnya pelayanan pengujian	Pembenahan tata kelola perhubungan.	Fasilitasi Perhubungan yang murah, mudah, aman, nyaman dan tertib.



MISI 2 (Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing Ekonomi) : Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	kendaraan bermotor.		
Meningkatkan iklim investasi daerah.	Meningkatnya ketersediaan regulasi investasi daerah. Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi.	Menyiapkan regulasi dan menyederhanakan perijinan.	Pembenahan iklim investasi.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan koperasi dan UMKM.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi. Meningkatnya kewirausahaan pelaku UMKM.	Mendorong pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang inovatif dan berdaya saing.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi dan UMKM.
Meningkatkan akses ketahanan pangan.	Meningkatnya ketersediaan pangan. Meningkatnya keanekaragaman sumber daya pangan.	Sosialisasi keanekaragaman pangan	Pemanfaatan keanekaragaman pangan.
Meningkatkan Kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan serta lembaga kemasyarakatannya.	Meningkatnya rasa kebersamaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Meningkatnya pelaksanaan program/ kegiatan pemberdayaan masyarakat.	Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat	Keterpaduan pembangunan di pedesaan.



MISI 2 (Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing Ekonomi) : Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan ketersediaan data/informasi untuk pembangunan.	Meningkatnya ketersediaan data/informasi.	Mendorong kelengkapan data informasi.	Mengoptimalkan system dan sumber data informasi.
Meningkatkan pengelolaan komunikasi dan informatika.	Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Meningkatnya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika. Meningkatnya kerjasama informasi dan media massa.	1. Kerjasama informasi dan komunikasi. 2. Meningkatkan kualitas SDM.	Peningkatan sistem Keterbukaan Informasi Publik.
Meningkatkan pengelolaan pertanian sebagai agribisnis.	Meningkatnya produktivitas pertanian. Meningkatnya produktivitas perkebunan. Meningkatnya produktivitas peternakan.	Merubah perilaku, sikap dan ketrampilan Petani.	Mendorong produktivitas pertanian.
Meningkatkan produksi dan pelestarian tanaman hutan.	Meningkatnya pelestarian hutan. Berkurangnya rasio hutan yang rusak	Meningkatkan kelestarian hutan dan lahan.	Zero Visit to Forest. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Melaksanakan	Terwujudnya	Mengembangkan,	Pengemba



MISI 2 (Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing Ekonomi) : Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
an pengembangan pariwisata budaya.	promosi pariwisata. Terwujudnya penataan obyek wisata. Terwujudnya pengembangan obyek wisata baru.	menata dan mempromosikan obyek pariwisata daerah.	ngan kepariwisataan yang sinergis dengan budaya dan potensi daerah.
Meningkatkan produktivitas perikanan dan kelautan.	Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap. Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya.	Mendorong produktivitas Perikanan dan kelautan.	Pengembangan sistem perikanan dan kelautan terpadu.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas perindustrian.	Meningkatnya peranan sektor industri terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Jemberana. Meningkatnya kualitas teknologi IKM di kabupaten Jemberana. Berkembangnya sentra-sentra industri potensial.	Mendorong produktivitas perindustrian.	Pengembangan industri unggulan daerah yang potensial.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas	Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa.	Mendorong produktivitas perdagangan.	Pengembangan perdagangan unggulan daerah



<p>MISI 2 (Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing Ekonomi) : Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
perdagangan.	<p>Meningkatnya perkembangan dan distribusi perdagangan.</p> <p>Meningkatnya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri.</p>		yang potensial.

Tabel 1.8

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3

<p>MISI 3 (Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas SDM) : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
<p>Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu</p>	<p>Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pendidikan</p> <p>Meningkatnya APK dan APM</p> <p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan</p> <p>Tersedianya Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berkualitas sesuai Kebutuhan</p>	<p>Mendorong Perluasan akses dan mutu pendidikan.</p>	<p>Pelayanan pendidikan yang berkualitas.</p>



MISI 3 (Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas SDM) :- Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	Menurunnya angka Drop Out (DO)		
Meningkatkan mutu/ kualitas SDM yang professional dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas SDM masyarakat Kabupaten Jember yang terampil. Meningkatnya kualitas aparatur Pemkab Jember dan pelayanan birokrasi kepada masyarakat.	Optimalisasi pengelolaan penyelenggara dan pelaksanaan diklat.	Melakukan kerjasama dengan LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan Badan Diklat Provinsi Bali.
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatnya Mutu, Jangkauan dan Sistem Layanan Masyarakat Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Meningkatnya Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Upaya Pengkajian dan Pengembangan Sumber	Mendorong upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif secara holistik	Membuat Regulasi yang Mendorong Pencapaian Upaya Kesehatan



MISI 3 (Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas SDM) : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	Daya Kesehatan		
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Tersedianya pelayanan kesehatan prima yang SERASI. Meningkatkan kepuasan pelanggan.	Pengembangan produk baru	
Meningkatkan pelayanan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta tertib kependudukan.	Meningkatnya pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil tertib kependudukan. Terkendalinya movilitas penduduk	Mengoptimalkan tertib administrasi kependudukan di kab Jemberana.	Pelayanan administrasi yang mudah dan berkualitas.
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. Meningkatnya kesadaran kelompok Catur Bina.	Optimalisasi Pengarusutamaan gender dan anak melalui ARG.	Kesetaraan gender dan perlindungan anak.
Meningkatkan kualitas	Meningkatnya kesehatan reproduksi	Mendorong peran serta masyarakat dalam ber	Peningkatan pemahaman



MISI 3 (Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas SDM) : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
keluarga berencana dan sejahtera.	remaja. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam KB.	KB dan pemberdayaan kelompok PIKKRR.	remaja terhadap alat reproduksi melalui triad KRR serta keikutsertaan PUS dalam ber KB.
Meningkatkan kualitas pengelolaan kesejahteraan sosial.	Meningkatnya pemberdayaan PMKS dan Komunitas Adat Terpencil. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat	Pengurangan beban PMKS dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat.	Pemberdayaan PMKS dan Perlindungan Sosial Masyarakat.
Meningkatkan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan.	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki daya saing.	1. Mendorong pengembangan ketenagakerjaan. 2. Meningkatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi.	Pengembangan sistem ketenagakerjaan.
Meningkatkan pengembangan kebudayaan.	Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya. Meningkatnya	Penanaman kecintaan pada budaya daerah dan nasional.	Merangsang pengembangan kebudayaan daerah dan



MISI 3 (Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas SDM) : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	Nilai-nilai Budaya. Meningkatnya pengelolaan —kekayaan budaya.		nasional.
Meningkatkan — kualitas pengelolaan kepemudaan — dan olahraga.	Meningkatnya peran serta kepemudaan. Meningkatnya kompetensi — dan kemampuan — pemuda dalam upaya penumbuhan kewirausahaan — dan kecakapan hidup Meningkatnya pasyarakat olahraga. Meningkatnya ketersediaan sarana — dan prasarana olahraga.	Mendorong kemandirian — pemuda — dan olahraga.	Meningkatkan — kualitas pemuda — dan olahraga.
Meningkatnya — pengolahan kearsipan daerah	Meningkatnya sarana — prasarana kearsipan. Meningkatnya SDM — dalam pengelolaan kearsipan	Optimalisasi pengelolaan kearsipan.	Meningkatnya — tertib administrasi kearsipan.
Meningkatkan — kualitas — dan kuantitas perpustakaan — di	Meningkatnya minat baca. Meningkatnya perpustakaan keliling.	Mendorong peningkatan — kualitas — dan kuantitas perpustakaan.	Komitmen pemerintah daerah meningkatkan budaya baca.



MISI 3 (Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas SDM) : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
kab. Jemberana.	Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan.		
Meningkatkan pengelolaan data elektronik.	Meningkatnya kualitas data elektronik. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pengelolaan data elektronik.	Mendorong penggunaan data elektronik.	Penyediaan fasilitas data elektronik.
Meningkatkan pengelolaan ketransmigrasian.	Meningkatnya minat masyarakat bertransmigrasi.	Sosialisasi ketransmigrasian.	Kerjasama ketransmigrasian.



Tabel 1.9
Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4

MISI 4 (Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari) :- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan kualitas Pekerjaan Umum.	<p>Meningkatnya rasio dan jalan yang baik.</p> <p>Meningkatnya saluran drainase/ gorong-gorong yang baik.</p> <p>Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana ——— Kebina Margaan.</p> <p>Meningkatnya rasio jaringan irigasi yang baik.</p> <p>Meningkatnya penyediaan air baku.</p> <p>Meningkatnya kinerja ——— pengendalian banjir.</p> <p>Meningkatnya pengembangan — wilayah strategis — dan — cepat tumbuh.</p> <p>Meningkatnya kualitas — infrastruktur pedesaan.</p>	Penyesuaian kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur.	Peningkatan; pengembangan, pemeliharaan sarana — dan prasarana infrastruktur.



MISI 4 (Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari) : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan pengelolaan perumahan.	Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat.	Penyehatan lingkungan.	Lingkungan yang lestari.
Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dan wilayah.	Meningkatnya ketersediaan dokumen tata ruang. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang.	Melengkapi regulasi tata ruang.	Tertib tata ruang.
Menurunkan eksploitasi sumberdaya mineral untuk pelestarian lingkungan.	Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C.	Meningkatnya sumber daya alam.	Membina Regulasi, eksploitasi Sumber Daya Alam.
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Meningkatnya	Pengurangan kerusakan lingkungan hidup.	Pemeliharaan dan pemulihan kelestarian lingkungan hidup.



<p>MISI 4 (Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari) : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	perlindungan dan konservasi sumber daya alam.		

Tabel 1.10

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 5

<p>MISI 5 (Prioritas 5 : Pembangunan Politik, Hukum dan HAM) : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.	<p>Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.</p> <p>Terwujudnya pemerintahan daerah yang mantap.</p> <p>Terwujudnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2010 yang tertib, aman, damai, tertib dan lancar.</p>	<p>Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam membangun iklim nasionalisme.</p>	<p>Pembaruan dan semangat nasionalisme.</p>
Meningkatkan	Terwujudnya	Peningkatan	Memberi



MISI 5 (Prioritas 5 : Pembangunan Politik, Hukum dan HAM) : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
an pembangunan sistem budaya politik yang demokratis, berkedaulatan rakyat dan menghargai perbedaan dan keragaman azas.	Pembekalan Teknis dan Pengenalan Dasar-dasar Linmas. Terwujudnya BinteK wawasan kebangsaan, bela-Negara dan diskusi politik.	profesionalisme linmas.	kesempatan mengikuti diklat dan pemantapan tugas linmas.
Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat serta partisipasi aktif dan semangat gotong royong dalam penanganan penanggulangan bencana dan pengungsi.	1- Terwujudnya sosialisasi kesiagaan dan penanggulangan bencana alam. 2- Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam.	Kesiapsiagaan bencana.	Meningkatkan kesiagaan bencana.
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan	Terwujudnya masyarakat jembrana yang aman, tertib dan tentram serta taat dan patuh terhadap peraturan	Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan dan perundang-undangan	Menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan meningkatkan kesadaran



<p>MISI 5 (Prioritas 5 : Pembangunan Politik, Hukum dan HAM) :</p> <p>Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
<p>pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.</p>	<p>dan perundang-undangan yang berlaku.</p>		<p>masyarakat jemberana agar taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku</p>
<p>Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Musibah Kebakaran.</p>	<p>Terwujudnya masyarakat Jemberana yang dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan musibah Kebakaran.</p>	<p>Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.</p>	<p>Meningkatkan kesadaran masyarakat jemberana untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan musibah kebakaran.</p>

Arah kebijakan pembangunan dari ke-5 misi tersebut akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan, yang dikelompokkan berdasarkan urusan. Adapun Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jemberana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 2 Tahun 2008, yang terdiri dari 2 komponen yaitu urusan wajib serta urusan pilihan. Pengelompokan berdasarkan urusan dan SKPD yang bertanggungjawab, sebagaimana tabel berikut;



Tabel 1.14

Pengelompokan Arah Kebijakan Berdasarkan Urusan

MISI 1 (Prioritas 4: Memwujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi)

Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
Meningkatnya ketersediaan kerjasama pembangunan.	Mendorong kerjasama antara pemerintah Kab. Jemberana dengan pemerintah daerah lainnya, propinsi dan pusat.	Perencanaan Pembangunan	BAPPE DA dan PM
Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan.	Mendorong pengembangan wilayah perbatasan.		
Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.	Memacu pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.		
Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.	Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.		
Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan.	Mengoptimalkan sumber daya perencanaan pembangunan.		
Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan ekonomi.	Mengoptimalkan		



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
<p>ketersediaan perencanaan pembangunan sosial budaya.</p> <p>Meningkatnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.</p> <p>Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.</p>	<p>sumber daya perencanaan pembangunan.</p> <p>Mengoptimalkan sumber daya perencanaan pembangunan.</p> <p>Mengoptimalkan sumber daya perencanaan pembangunan.</p> <p>Mengoptimalkan sumber daya perencanaan pembangunan.</p>		
<p>Meningkatnya hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.</p> <p>Tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat.</p>	<p>Mendorong penjangking dan aspirasi masyarakat.</p>	<p>Otonom i Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p>	<p>Sekretariat DPRD</p>
<p>Meningkatnya</p>	<p>1. Sinkronisasi</p>	<p>Otonom</p>	<p>SETDA</p>



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
koordinasi antar pemerintah.	prioritas program. 2. Medorong layanan prima.	Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	Penguatan regulasi pedoman kerja.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	SETDA
Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang keuangan daerah. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang aset daerah. Meningkatnya	Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,	SETDA



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
ketersediaan regulasi tentang pendapatan daerah. Meningkatnya pendapatan asli daerah.		Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
Meningkatnya capaian kinerja pemerintah dan laporan keuangan daerah. Meningkatnya sistem pengawasan Internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Meningkatnya disiplin kerja aparatur.	Pengembangan dan penerapan Sistem Pengawasan Internal.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	INSPEKTORAT
Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	SETDA
Meningkatnya ketersediaan peraturan	Penyusunan produk hukum daerah	Otonomi Daerah,	SETDA



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
perundang-undangan di daerah	Dokumentasi peraturan perundang-undangan	Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandia	
Meningkatnya kesesuaian kelembagaan daerah dengan pemerintah pusat.	Mendorong Harmonisasi kelembagaan.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandia	SETDA
Meningkatnya ketersediaan sumber daya aparatur. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur.	1. Rekrutmen aparatur. 2. Mendorong kinerja aparatur.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat	BKD



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
		Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
<p>1. Meningkatkan pelayanan perijinan yang tepat, cepat, benar dan transparan.</p> <p>2. Meningkatkan masyarakat yang wajib ijin.</p>	<p>Layanan yang mudah dan berstandar.</p> <p>menyederhanakan proses dan persyaratan perijinan.</p>	<p>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p>	KPPT
<p>Meningkatnya kepastian hukum kepemilikan dan penggunaan tanah.</p>	<p>Tertib hukum pengelolaan aset pertanahan daerah.</p>	<p>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p>	SETDA
<p>MISI-2 (Prioritas 2 – Peningkatan Daya Saing Ekonomi) – Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.</p>			



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
<p>Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan sarana transportasi.</p> <p>Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas.</p> <p>Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p>Pembenahan tata kelola perhubungan.</p>	<p>Bidang Perhubungan</p>	<p>Dinas Perhubungan, komunikasi dan Infomatika</p>
<p>Meningkatnya ketersediaan regulasi investasi daerah.</p> <p>Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi.</p>	<p>Regulasi Investasi.</p>	<p>Bidang Ekonomi dan PM</p>	<p>BAPPE DA dan PM</p>
<p>Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.</p> <p>Meningkatnya kewirausahaan pelaku UMKM.</p>	<p>Mendorong pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang inovatif dan berdaya saing.</p>	<p>Bidang Koperasi</p>	<p>Dinas Perindagkop</p>
<p>Meningkatnya ketersediaan pangan.</p> <p>Meningkatnya keanekaragaman sumber daya pangan.</p>	<p>Sosialisasi keanekaragaman pangan</p>	<p>Ketahanan pangan</p>	<p>BPMP D</p>



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
<p>Meningkatnya rasa kebersamaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.</p> <p>Meningkatnya pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Pemberdayaan masyarakat desa</p>	<p>BPMP D</p>
<p>Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa/kelurahan</p>	<p>Meningkatnya kinerja aparatur desa/kelurahan</p>	<p>Pemberdayaan masyarakat desa</p>	<p>BPMP D</p>
<p>Meningkatnya ketersediaan data/informasi.</p>	<p>Mendorong kelengkapan data-informasi.</p>	<p>Bidang Sarana dan Prasarana</p>	<p>BAPPE DA Dan PM</p>
<p>Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi.</p> <p>Meningkatnya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika.</p>	<p>1. Kerjasama informasi dan komunikasi.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas SDM.</p>	<p>Bidang Komunikasi dan Informatika</p>	<p>Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika</p>
<p>Meningkatnya produktivitas pertanian.</p> <p>Meningkatnya produktivitas perkebunan.</p>	<p>Merubah perilaku, sikap dan ketrampilan Petani.</p>	<p>Bidang Pertanian, peternakan, dan</p>	<p>Dinas PPP</p>



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
Meningkatnya produktivitas peternakan.		perkebunan	
Meningkatnya pelestarian hutan. Berkurangnya rasio hutan yang rusak.	Meningkatkan kelestarian hutan dan lahan.	Bidang Kehutanan	Dinas KPK
Terwujudnya promosi pariwisata. Terwujudnya penataan obyek wisata. Terwujudnya pengembangan obyek wisata baru.	Mengembangkan, menata dan mempromosikan obyek pariwisata daerah.	Pariwisata	Dikpora parbud
Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap. Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya.	Mendorong produktivitas Perikanan.	Bidang Perikanan dan Kelautan	Dinas KPK
Meningkatnya peranan sektor industri terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Jemberana. Meningkatnya kualitas teknologi IKM di kabupaten Jemberana. Berkembangnya	Mendorong produktivitas perindustrian.	Bidang Perdagangan	Dinas Perindustri



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
<p>sentra-sentra industri potensial.</p> <p>Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa.</p> <p>Meningkatnya perkembangan dan distribusi perdagangan.</p> <p>Meningkatnya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri.</p>	<p>Mendorong produktivitas perdagangan.</p>	<p>Bidang Perindustrian</p>	<p>Dinas Perindustri dan Perdagangan</p>
<p>MISI 3 (Prioritas 1 - Peningkatan Kualitas SDM) - Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya</p>			
<p>Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pendidikan</p> <p>Meningkatnya APK dan APM</p> <p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan</p> <p>Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas sesuai kebutuhan</p>	<p>Mendorong perluasan akses dan mutu pendidikan.</p>	<p>Pendidikan</p>	<p>Dikpora dan Parbud</p>



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
Menurunnya angka drop out (DO)			
Meningkatnya kualitas SDM masyarakat Kabupaten Jembrana yang terampil. Meningkatnya kualitas aparatur Pemkab Jembrana dan pelayanan birokrasi kepada masyarakat.	Optimalisasi pengelolaan penyelenggara dan pelaksanaan diklat.	Pendidikan	BKD
Meningkatnya mutu, jangkauan dan system layanan masyarakat. Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Meningkatnya upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan.	Mendorong upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi secara holistik.	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Tersedianya pelayanan kesehatan prima yang SERASI.	Pengembangan produk baru	Bidang Pelayanan Medik	RSU Negara



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
Meningkatkan kepuasan pelanggan.			
Meningkatnya Pelayanan di bidang kependudukan dan capil serta tertib kependudukan. Terkendalnya mobilitas penduduk di kab. jembrana.	Mengoptimalkan tertib administrasi kependudukan di kab Jembrana.	Kependudukan	Dinas Dukcapil
Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. Meningkatnya kesadaran kelompok catur bina.	Optimalisasi Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak melalui ARG.	Kasi Pemberdayaan Perempuan	Kantor PPKB
Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam KB.	Mendorong peran serta masyarakat dalam ber KB dan pemberdayaan kelompok PIKKRR.	Kasi KB dan Reproduksi Kasi Ketahanan Pemberdayaan Keluarga	Kantor PPKB
Meningkatnya pemberdayaan PMKS dan	Pengurangan beban PMKS dan peningkatan	Sosial	Dinas Kesos



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
komunitas adat terpencil. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	partisipasi masyarakat		Nakertran
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Meningkatnya Tenaga Kerja terampil yang memiliki daya saing.	1. Mendorong pengembangan ketenagakerjaan. 2. Meningkatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi.	Tenaga Kerja	Dinas Kesos Nakertran
Meningkatnya pengembangan nilai-nilai budaya. Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya. Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya	Penanaman kecintaan pada budaya daerah dan nasional.	Kebudayaan	Dikpora parbud
Meningkatnya peran serta kepemudaan. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan pemuda dalam upaya penumbuhan	Mendorong kemandirian pemuda dan olahraga.	Kepemudaan dan Olahraga	Dikpora parbud



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
kewirausahaan dan kecakapan hidup. Meningkatnya pemasyarakatan olahraga. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga.			
Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan. Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan.	Optimalisasi pengelolaan kearsipan.	Kearsipan	Kantor Perpustakaan Dan Arsip
Meningkatnya minat baca. Meningkatnya layanan perpustakaan keliling. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan.	Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas perpustakaan.	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan Dan Arsip
Meningkatnya kualitas data elektronik. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pengelolaan data elektronik.	Mendorong penggunaan data elektronik.	Keharsipan	Kantor Perpustakaan Dan Arsip
Meningkatnya minat masyarakat	Sosialisasi ketransmigrasian.	Transmigrasi	Dinas Kesos



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
bertransmigrasi.			Nakertran
MISI 4 (Prioritas 3 - Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari) → Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan			
Meningkatnya rasio dan jalan yang baik. Meningkatnya saluran drainase/ gorong-gorong yang baik. Meningkatnya rasio jaringan irigasi yang baik, efektif dan berdaya guna Meningkatnya penyediaan air baku. Meningkatnya kinerja pengendalian banjir, yang berhasil dan berdaya guna di Unit Kab. Jemberana. Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.	Penyesuaian kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur. Penyesuaian kebutuhan air minum masyarakat.	Pekerja an Umum Pekerja an Umum Perumahan Pekerja an Umum	Dinas PU



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
<p>kinerja pengelolaan persampahan.</p> <p>Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.</p> <p>Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.</p>	<p>kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>Peningkatan pencadangan sumber daya alam</p>	<p>gan-Hidup</p>	<p>LHKP</p>
<p>MISI 5 (Prioritas 5 – Pembangunan Politik, Hukum dan HAM) – Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.</p>			
<p>Terwujudnya masyarakat Jembrana yang aman, tertib dan tentram serta taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Penyelesaian dan pelayanan bantuan masalah-masalah hukum dan HAM.</p> <p>Penyuluhan hukum dan pembinaan desa-sadar hukum</p> <p>Sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p>	<p>Setda</p>
<p>Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.</p>	<p>Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam</p>	<p>Kesatuan bangsa dan politik dalam</p>	<p>Kesbang Dan Pol</p>



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
<p>Terwujudnya pemerintahan daerah yang mantap.</p> <p>Terwujudnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2010 yang tertib, aman, damai, tertib dan lancar.</p>	<p>membangun iklim nasionalisme.</p>	<p>negeri</p>	
<p>Terwujudnya Pembekalan Teknis dan Pengenalan Dasar-dasar Linmas.</p> <p>Terwujudnya Bintek wawasan kebangsaan, bela Negara dan diskusi politik.</p>	<p>Peningkatan profesionalisme linmas.</p>	<p>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p>	<p>Sat- Pol PP</p>
<p>1. Terwujudnya sosialisasi kesiagaan dan penanggulangan bencana alam.</p> <p>2. Terwujudnya pengadaan sarana dan</p>	<p>Kesiapsiagaan bencana.</p>	<p>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat</p>	<p>Sat- Pol PP</p>



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam.		Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
Terwujudnya masyarakat jembrana yang aman, tertib dan tentram serta taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan dan perundang-undangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sat Pol PP
Terwujudnya masyarakat Jembrana yang dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan musibah Kebakaran.	Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sat Pol PP
Meningkatnya Peningkatan kesiagaan dan	Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan	Otonomi Daerah,	Satpol PP



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
pengecahan — bahaya kebakaran	bahaya kebakaran	Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
Meningkatnya pelaksanaan — pencegahan dini — dan — penanggulangan bencana alam	Peningkatan — peran linmas — dan — penanggulangan bencana alam	Otonom i — Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Satpol PP
Meningkatnya pelaksanaan — Penegakan Peraturan — Perundang- undangan	Memelihara Ketentraman — dan — Ketertiban Umum dengan melaksanakan Patroli Gangguan Trantib Penegakan Perundang-undangan	Otonom i — Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian	Satpol PP



Sasaran	Strategi	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
		dan Persandian	

C. Permasalahan Utama

Permasalahan merupakan kesenjangan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Permasalahan pembangunan diperoleh dari hasil analisis gambaran umum daerah dan analisis capaian kinerja daerah.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi untuk menggapai peluang dan meminimalisasi hambatan. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tidak semua permasalahan tiap urusan dijadikan sasaran pokok, mengingat keterbatasan pendanaan, isu strategis yang muncul, fokus kepada agenda paling strategis, dan hubungannya dengan agenda-agenda pembangunan yang telah berhasil dicapai di periode sebelumnya. Dengan pendekatan manajemen strategis, permasalahan pada urusan atau gabungan urusan yang akan dijadikan

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: First line: 0 cm



sebagai dasar penentuan sasaran pokok adalah permasalahan-permasalahan yang memiliki dampak paling tinggi terhadap pembangunan dan kriteria-kriteria lain yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Perumusan permasalahan pembangunan pada tiap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah guna mendapatkan rumusan permasalahan pada masing-masing urusan sebagai berikut ini;

I. Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan per Urusan:

1. Pendidikan

Permasalahan Pendidikan:

- a. Dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memahami bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan.
- b. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama pada rehab sedang/berat dan penambahan dan pembangunan ruang kelas baru yang bersumber dari dana dekonsentrasi mengalami kendala pengelolaan yang mana belum bisa dikelola secara swakelola sehingga memerlukan sumber daya dalam pengawasan lebih banyak untuk bisa mengawasi pelaksanaannya secara optimal, dan terkadang didalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) juknis sering datang terlambat sehingga proses kegiatan yang telah direncanakan sering terlambat terutama untuk dana pembangunan dan rehab bangunan sekolah.

Formatted: Indent: Left: 0 cm,
Hanging: 0,63 cm

Formatted: Indent: Left: 0,48 cm



2. Kesehatan

Permasalahan Kesehatan :

a. Permasalahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Demam

Berdarah Dengue (DBD) adalah Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk. Solusi yang dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan dengan melibatkan lintas program dengan melibatkan peranan tenaga outdoor di posda yandu.

b. Permasalahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan HIV / AIDS

antara lain :

- Kurangnya kesadaran kelompok resiko tinggi untuk melakukan VCT
- Belum adanya kesamaan persepsi stakeholders dalam upaya penanganan HIV / AIDS.
- Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah HIV / AIDS.
- Adanya stigma dimasyarakat yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
- Kurangnya kesadaran kelompok resiko tinggi untuk melakukan safe sex dengan menggunakan kondom.

c. Permasalahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Malaria antara lain:

- adanya migrasi penduduk dari luar Jembrana atau Luar Bali yang berasal dari daerah endemis malaria ke Kabupaten Jembrana
- masih rendahnya pemahaman dan peranserta masyarakat dalam upaya pemberantas penyakit malaria sehingga menyulitkan untuk penanganan malaria secara menyeluruh.

a. 4d. Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan bekerja sama dengan petugas outdoor yang tersebar di masing-masing dusun agar dapat menyebarkan informasi yang benar tentang penyakit malaria. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA)

b. Masih rendahnya persentase Rumah Tangga Sehat.

Formatted: Indent: Left: 0,48 cm

Formatted: Indent: Left: 0,95 cm, First line: 0 cm

Formatted: Font: Arial

Formatted: Indent: Left: 1,09 cm, Tab stops: Not at 1,27 cm

Formatted: Indent: Left: 1,72 cm

Formatted: Font: Arial

Formatted: Indent: Left: 0,93 cm, Tab stops: Not at 1,27 cm

Formatted: Indent: Left: 1,56 cm

Formatted: Font: Arial

Formatted: Indent: Left: 0,95 cm, Hanging: 0,48 cm, No bullets or numbering



~~e. Masih tingginya prevalensi penyakit menular dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular dan Degeneratif.~~

3. Pekerjaan Umum

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember adalah :

- a. Terjadinya rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan.
- b. Keberadaan dari jasa pelaksanaan bangunan yang kadang tidak sesuai dengan pengajuan pendaftaran penawaran.
- c. Kurangnya waktu pelaksanaan terutama pada akhir tahun.
- d. Terbatasnya anggaran yang menyebabkan tertundanya pekerjaan.
- e. Musim hujan yang berkepanjangan menyebabkan turunnya kualitas hasil pekerjaan.

4. Perumahan

Permasalahan Perumahan: Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih, solusi yang diambil bekerja dengan unsur terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang budaya hidup bersih

5. Tata Ruang

Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah bahwa saat ini pembangunan di wilayah perkotaan lebih memprioritaskan kepada pembangunan fisik dan lebih menekankan pada fungsi ekonomi dari pada fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan.

6. Perencanaan Pembangunan

- a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan sampai Musrenbang pembangunan Nasional serta penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dapat dilaksanakan sesuai petunjuk pemerintah pusat sehingga Perda APBD dan Perbub tentang penjabaran APBD dapat diselesaikan pada akhir tahun.

Formatted: Indent: Left: 1,11 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0,48 cm, Hanging: 0,63 cm

Formatted: Indent: Left: 1,11 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0,48 cm, Hanging: 0,63 cm

Formatted: Indent: Left: 1,11 cm, First line: 0 cm

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Left: 0,48 cm, Hanging: 0,63 cm

Formatted: Justified, Indent: Left: 1,11 cm, Hanging: 0,63 cm

Formatted: Indonesian



a. _

~~2b. Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Daerah tidak mengalami hambatan karena tim Penyusunan LAKIP dapat bekerja dengan baik. SKPD dapat menyampaikan Kontribusi lakip dan capaian Kinerja yang lengkap. Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan perencanaan pembangunan, sering terlambat karena data dilapangan sering berbeda dengan lapaoran yang disampaikan oleh SKPD.~~

~~b. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan sampai Musrenbang pembangunan Nasional serta penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dapat dilaksanakan sesuai petunjuk pemerintah pusat sehingga Perda APBD dan Perbub tentang penjabaran APBD dapat diselesaikan pada akhir tahun.~~

~~e. Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan perencanaan pembangunan, sering terlambat karena data dilapangan sering berbeda dengan lapaoran yang disampaikan oleh SKPD.~~

7. Perhubungan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai sebagai tenaga teknis di bidang perhubungan.
- b. Terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS saat ini yang tersedia hanya 1 orang) di bidang perhubungan, khususnya penyidikan terhadap pelanggaran UU lalu lintas, sehingga pelaksanaan sidang di tempat operasi belum dapat berjalan secara optimal.
- c. Kurang tertib dan disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas.
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk menguji/kir secara berkala kendaraannya.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan angkutan untuk mencari ijin trayek dan usaha ijin angkutan.
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan

8. Lingkungan Hidup

Formatted: Justified, Indent: Left: 1,11 cm

Formatted: Justified, Indent: Left: 1,11 cm, Hanging: 0,63 cm

Formatted: Font: Arial, 12 pt

Formatted: Font: Arial, 12 pt

Formatted: Font: Arial, 12 pt

Formatted: Indent: Left: 1,11 cm

Formatted: Indent: Left: 0,48 cm, Hanging: 0,63 cm



Permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pogram dan Kegiatan yang dijumpai adalah sebagai berikut :

Formatted: Indent: Left: 1,11 cm, First line: 0 cm

- a. Terjadi rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan
- b. Kompleknya rencana/desain terutama yang menyangkut pertamanan
- c. Untuk Pembuatan Jalan Setapak Sempadan Sungai pelaksanaanya terpengaruh oleh faktor hujan
- d. Kurangnya SDM dan prasarana kerja dan dana
- e. Pengelolaan sampah masih menggunakan sistim open damping

9. Pertanahan

Formatted: Indent: Left: 0,48 cm

Permasalahan disektor pertanahan adalah masih kecilnya kewenangan pemerintah daerah terkait dengan masalah pertanahan. Solusinya adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak BPN dalam setiap pelaksanaan kegiatan terkait masalah pertanahan.

Formatted: Indent: Left: 1,11 cm, First line: 0 cm

10. Kependudukan dan Capil

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain Luasnya wilayah operasi pembinaan kependudukan serta jumlah SDM yang terbatas, data base kependudukan yang masih perlu disempurnakan, mobilitas penduduk pendatang masih cukup tinggi, masih dijumpai KTP yang telah habis masa berlakunya tetapi tidak diperpanjang, kelengkapan persyaratan administrasi dari pemohon akte capil sering tidak lengkap, masih terjadi kesalahan dalam penulisan data permohonan akte catatan sipil akibatnya menyulitkan pemrosesan lebih lanjut, kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam kartu keluarga (KK) terhadap kejadian vital (lahir, mati, datang dan pindah) masih perlu ditingkatkan, kesadaran masyarakat untuk melengkapi diri dengan KTP masih perlu ditingkatkan, kesadaran tentang tertib administrasi kependudukan perlu ditingkatkan lagi dan kesadaran masyarakat tentang kepemilikan akte catatan sipil masih perlu ditingkatkan, baru mencari akte catatan sipil saat diperlukan.

Formatted: Indent: Left: 1,11 cm, First line: 0 cm

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Formatted: Indent: Left: 0 cm



Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Belum optimalnya lembaga perlindungan anak di Jember.
- b. Belum optimalnya kegiatan organisasi perempuan yang ada, belum optimalnya fungsi Kesekretariatan Satgas GSI-B Tingkat Kecamatan dan Desa dan kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan GSI- Bayi Baru Lahir.
- c. Belum tersedianya dana untuk visum KDRT dan ruang konseling

12. KB dan Keluarga sejahtera

Permasalahan pada KB dan Keluarga sejahtera adalah terbatasnya dan tenaga penyuluh KB. Permasalahan yang dihadapi antara lain masih rendahnya partisipasi pria dalam ber KB, masih adanya PUS Unmetneed, dan PUS Muda.

13. Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember dalam tahun 2011 antara lain adanya pendatang dari luar daerah dan pelbagai kasus PMKS sulit untuk dapat diatasi secara tuntas. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, bersama-sama dengan trantib Kabupaten Jember, Dinas sosial Prov. Bali dan Kementrian Sosial RI memberikan penyuluhan-penyuluhan, bimbingan sosial dan bantuan sosial bimbingan sosial dalam upaya menyadarkan dan menumbuhkan potensi mereka (PMKS) sehingga kasus-kasus PMKS kedepan dapat ditekan seminimal mungkin.

14. Ketenagakerjaan

Pada bidang penempatan tenaga kerja permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja, Job order pemagangan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri masih ditentukan oleh pihak penerima , sistim pelaksanaan seleksi pemagangan ke luar negeri sangat ketat dan selektif, sedangkan permasalahan yang dihadapi pada bidang hubungan industrial dan pengawasan adalah kurangnya dukungan dana yang dimiliki Sekretariat LKS tripartit sehingga untuk melakukan

Formatted: Indent: First line: 0,79 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, First line: 0 cm



inventarisasi permasalahan ke lapangan sangat terbatas, rendahnya penyerapan perusahaan tentang peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan, masih ada perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan, masih ada pemikiran dalam perusahaan bahwa keberadaan LKS Tripartit belum dianggap penting, masih banyak perusahaan yang belum menyertakan karyawannya dalam program Jamsostek, masih banyak perusahaan yang belum membuat laporan keadaan tenaga kerjanya (Wajib Lapor Ketenagakerjaan), masih banyak tenaga kerja belum mengerti dan memahami hak dan kewajiban Normatif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan.

15. Koperasi dan UKM

Dalam upaya mencapai sasaran masih ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut :

Sektor Koperasi

- a. Kualifikasi Koperasi yang telah terbentuk perkembangannya relatif Belum optimal.
- b. Dengan Jumlah Koperasi yang semakin banyak menyebabkan terjadinya persaingan yang kurang sehat diantara Koperasi sehingga berdampak buruk bagi perkembangan Koperasi kedepan secara kualitatif.
- c. Kemitraan Koperasi dengan Perusahaan swasta, BUMN ataupun dengan Bank masih sangat rendah (sedikit), hal ini disebabkan karena Koperasi kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis Bank (tidak Bankable).

16. Penanaman Modal

Peningkatan investasi di Kabupaten Jember masih kecil, belum optimalnya minat investasi dan belum mantapnya sistem administrasi penanaman modal.

17. Kebudayaan



Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan adalah kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya di Bali.

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, First line: 0 cm

18. Pemuda dan Olah Raga

Formatted: English (U.S.)

Terbatasnya pelatihan olah raga dan minimnya dana pembinaan merupakan salah satu permasalahan dalam olahraga, sedangkan pergaulan bebas dan degradasi moral merupakan permasalahan dalam pembinaan pemuda.

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, First line: 0 cm

19. Kesbanglinmas Poldagri

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Rasa Nasionalisme dan Kebangsaan disebagian masyarakat masih kurang sehingga banyak kita temukan isu – isu seperti terorisme, munculnya kelompok-kelompok yang mengarah ke disintegrasi bangsa, kekerasan dan lain-lainnya.

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, First line: 0 cm

20. Otonomi Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah, seperti lemahnya kepengawasan, belum optimnya pengelolaan keuangan, masih terbatasnya tenaga trantib serta terbatasnya tenaga penanggulangan bencana. Masih terbatasnya tenaga kepegawaian dan masih lambatnya proses administrasi kepegawaian karena disamping melibatkan instansi lain seperti Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian PAN dan RB dan juga Sekretariat Negara.

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, First line: 0 cm

21. Ketahanan Pangan

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,79 cm

Permasalahan pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah Belum mantapnya koordinasi antara pelaku dalam mata rantai sistem ketahanan pangan di tingkat lapangan. Solusinya adalah dilaksanakannya penyuluhan – penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif.

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, First line: 0 cm

Permasalahan Program Diversifikasi pangan dan gizi keluarga adalah kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan/lahan Kosong

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm



belum optimal dan belum adanya anggaran untuk pemantauan dan analisis konsumsi pangan

22. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Permasalahannya antara lain :

- 4a. Pengetahuan dan Keterampilan pemanfaatan TTG yang telah diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan usaha, sehingga nilai tambah yang didapatkan belum optimal
- 2b. TTG yang diterapkan oleh Pokmas belum sepenuhnya merupakan rekayasa murni Pokmas (merekayasa yang sudah ada) sehingga produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang hampir sama sehingga daya saingnya kurang optimal.

23. Statistik

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan statistik yaitu data yang didapatkan dari sumber yang tersedia sering kurang lengkap dan kurang akurat, sebagai akibat lemahnya administrasi dimasing-masing SKPD yang menangani.

24. Komunikasi dan Informasi

Secara umum pencapaian sasaran tersebut telah berhasil dengan baik karena adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya IPTEK dalam era globalisasi sangat tinggi namun demikian masih terdapat kendala masalah antara lain:

- a. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai tenaga teknis di bidang infokom
- b. Terbatasnya jumlah SDM dibandingkan dengan lingkup tupoksi serta masih ada tenaga IT yang diperbantukan di Kecamatan
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional infokom yang memadai, seperti mobil unit siaran keliling untuk penyebarluasan informasi melalui multimedia, serta sarana yang lain untuk mendukung kelancaran tugas infokom

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,79 cm

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, Hanging: 0,63 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,79 cm

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0,95 cm, First line: 0 cm



- d. Belum optimalnya dukungan lembaga desa maupun sekolah dalam pelaksanaan tugas di bidang informatika
- e. Belum tersedianya sarana dan prasarna yang memadai untuk mengakomodasi kepentingan para wartawan sebagai partner pemerintah dalam mempublikasikan hasil-hasil pembangunan
- f. Belum tersedianya ruangan telepon kedaruratan atau call centre dan petugas yang menjaganya selama 24 jam.

25. Pepustakaan

—Melihat kondisi dan situasi yang ada saat ini, maka permasalahan yang dihadapi dalam hal pengembangan Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana adalah :

- a. Masih kurangnya kemampuan aparatur yang bertugas dalam pengelolaan Perpustakaan, sehingga perlu dilaksanakan Bimbingan teknis dan juga adanya petugas fungsional Pustakawan.
- b. Rendahnya minat baca bagi Masyarakat Umum , dengan indikator masih sedikitnya kunjungan ke Perpustakaan Umum, sehingga perlu ditingkatkan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya budaya baca dan gemar membaca.
- c. Masih terbatasnya sarana Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana termasuk Gedung Kantor yang kurang representative sehingga kurang menarik bagi pengguna jasa Perpustakaan dan kedepan diharapkan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana memiliki Kantor tersendiri dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum.

26. Arsip

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kearsipan adalah

- a. Terbatasnya jumlah petugas kearsipan
- b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Kearsipan
- c. Belum adanya Jabatan Fungsional Kearsipan / Arsiparis.

27. Pertanian

Formatted: Indent: Left: 0,03 cm, Hanging: 0,77 cm

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0,03 cm, Hanging: 0,77 cm



Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pertanian adalah sebagai berikut:

- 4a. Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi Subak yang dalam keadaan rusak.
- 2b. Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah.
- 3c. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi non pertanian;
- 4d. Masih tingginya konsumsi beras dan masih rendahnya diversifikasi pangan, sehingga gizi kurang berimbang.
- 5e. Adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
- 6f. Masih rendahnya permodalan petani.
- 7g. Nilai jual hasil pertanian sangat tergantung posisi tawar penebas.
- 8h. Masih rendahnya respon masyarakat terhadap penyakit ternak dan kurang efektifnya petani ternak terhadap cara-cara pemeliharaan ternak sesuai teknis.

28. Kehutanan

Permasalahan Kehutanan yang dihadapi di tahun 2010 secara umum adalah sebagai berikut :

- 1a. Terbatasnya personil pada Bidang Kehutanan dibanding dengan volume pekerjaan, yang mana beberapa orang akan memasuki masa pensiun.
- 2b. Masih adanya ancaman gangguan keamanan hutan yang sangat mengkhawatirkan terjadinya peningkatan degradasi hutan.
- 3c. Belum terfasilitasi sarana secara maksimal proses penanganan berbagai kasus Tindak Pidana Kehutanan.
- 4d. Belum adanya dukungan personil, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengamanan hutan.
- 5e. Adanya beberapa perubahan bentang alam, sehingga batas kawasan hutan menjadi kurang mantap/kurang jelas antara tanah Negara dengan lahan milik.
- 6f. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak terlepas dari intensitas curah hujan. Sehubungan dengan adanya isu Global

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indent: Hanging: 0,84 cm

Formatted: Indent: Left: 0,03 cm, Hanging: 0,92 cm

Formatted: Indent: Left: 0,95 cm, First line: 0 cm



Warming (pemanasan global) diseluruh dunia termasuk Indonesia maka prakiraan adanya intensitas curah hujan sangat sulit untuk dilakukan sehingga sangat berpengaruh terhadap tata waktu pelaksanaan kegiatan khususnya Penanaman.

29. Energi - dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan dan kendala yang dihadapi pada Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Jember antara lain :

- a. Dalam Tata Ruang tidak adanya kawasan pertambangan dikarenakan memang tidak adanya kawasan yang mempunyai potensi bahan tambang terutama galian golongan C.
- b. Bahan tambang galian golongan C terdapat pada alur sungai, namun pada alur sungai banyak terdapat bangunan fasilitas umum seperti jembatan, bendungan dan tanggul tebing sungai, sehingga sangat membahayakan apabila galian golongan C dieksploetasi terutama dari segi keselamatan bangunan dan bahaya longsor pada sempadan sungai.
- c. Kebutuhan masyarakat akan bahan galian golongan C sangat diperlukan sebagai bahan bangunan.
- d. Belum tersedianya tenaga (Sumber Daya Mineral) yang mempunyai keahlian dibidang Pertambangan dan Energi.

30. Pariwisata

Kurang dikenalnya Kabupaten Jember sebagai salah satu destinasi wisata di Bali dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga factor jarak tempuh dari airport serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sector pariwisata.

31. Kelautan dan Perikanan

Secara teknis permasalahan yang sering muncul adalah sebagai berikut:

- a. Masih terjadi pendaratan ikan secara liar .

Formatted: Indent: Left: 0,03 cm, Hanging: 0,77 cm

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0,03 cm, Hanging: 0,77 cm

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0,03 cm, Hanging: 0,77 cm

Formatted: Indent: First line: 0,79 cm



- b. Terjadinya penurunan produksi tambak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terjadinya serangan hama penyakit yang diduga disebabkan oleh kualitas air yang dipakai media pemeliharaan rendah, hal ini disebabkan karena saluran irigasi yang ada kurang representatif.
- c. Kolam yang ada di BBI terlalu luas sehingga menyulitkan dalam operasional.

32. Perdagangan

Disamping adanya faktor pendukung keberhasilan sebagaimana telah diuraikan di atas. dalam usaha pencapaian sasaran juga ditemui beberapa permasalahan antara lain :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kepemilikan SIUP dan TDP .
- b. Adanya peraturan pusat yang menyatakan bahwa untuk pengurusan perizinan yaitu SIUP/TDP dikenakan biaya Rp 0,- (Nol rupiah) itu menyebabkan pemenuhan PAD dari sektor perijinan SIUP/TDP tidak bisa mencapai target.
- c. Rendahnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembina dan pengusaha industri dan perdagangan.
- d. Terlalu seringnya terjadinya mutasi pegawai sehingga seseorang sudah memiliki keahlian dipindahkan ke instansi yang lain.
- e. Masih adanya para pengusaha yang tidak melakukan perpanjangan/pembaharuan SIUP/TDP dengan alasan karena kegiatan usahanya tidak aktif dan sebagian lagi pemiliknya tidak ada ditempat.
- f. Rendahnya wawasan pelaku usaha UKM terhadap promosi.
- g. Terbatasnya prasarana dan sarana operasional aparat pembina termasuk sarana transportasi roda 4.
- h. Terbatasnya sarana dan prasarana kemetrolgian serta tenaga teknis kemetrolgian yang tersedia.

33. Perindustrian



Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perindustrian terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu Internal (Aparatur) dan Eksternal (Lingkungan Global). Permasalahan dari aspek Internal antara lain :

- a. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas.
- b. Kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan.

Sedangkan dari aspek eksternal, permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Ketatnya tingkat persaingan pasar.
- b. Dinamisnya selera konsumen.
- c. Tingginya cost produksi.
- d. Maraknya Black Market.
- e. Kurang kondusifnya iklim usaha.

34. Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi adalah untuk pelaksanaan transmigrasi tahun 2011 belum dapat dilaksanakan karena program transmigrasi sepenuhnya dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang kuotanya ditentukan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali, kemudian baru dialokasikan kepada Kabupaten/Kota.

II. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : 1) Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah—, dan 2) Permasalahan Identifikasi—Juklak Juknis permasalahan—Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

1. III. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2010-2011, prediksi capaian kinerja Tahun 2012 dapat disimpulkan permasalahan

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0,03 cm, Hanging: 0,77 cm

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, First line: 0 cm

Formatted: Font: Arial

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, First line: 0 cm

Formatted: Font: Arial

Formatted: Font: Arial

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, Hanging: 0,79 cm

Formatted: Indent: Left: 1,59 cm, First line: 0 cm



daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan pendanaan pembangunan untuk mencapai prioritas program sangat terbatas.
- b. Masih ditemukan adanya salah penganggaran (misalnya salah kode rekening belanja sehingga tidak bisa direalisasikan).

2)2. Permasalahan Juklak Juknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Terlambatnya Juklak dan Juknis kegiatan yang didanai dari Dana Tugas Perbantuan, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus sehingga realisasi kegiatan yang didanai dari sumber-sumber dana tersebut sangat rendah.

Permasalahan Pembangunan Daerah dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- 1). Permasalahan Pembangunan Daerah, dan 2) Identifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah:

C.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2007-2011, prediksi capaian kinerja Tahun 2012-2016 dapat disimpulkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan pendanaan pembangunan untuk mencapai prioritas program sangat terbatas. Masih ditemukan adanya salah penganggaran (misalnya salah kode rekening belanja sehingga tidak bisa direalisasikan).
- b. Terlambatnya Juklak dan Juknis kegiatan yang didanai dari Dana Tugas Perbantuan, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus sehingga realisasi kegiatan yang didanai dari sumber-sumber dana tersebut sangat rendah.

C.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2007-2011, prediksi capaian kinerja Tahun 2012 diidentifikasi Isu strategis adalah sebagai berikut:

- 1. Adanya beban kerja SKPD yang sangat berat karena kurangnya SDM sehingga dalam melaksanakan aspek pelayanan umum sangat terbatas.
- 2. Masih adanya tumpang tindih kewenangan antar tingkatan pemerintahan yang menyulitkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

D. Ruang Lingkup

Formatted: Indent: Left: 1,9 cm, Hanging: 0,63 cm

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Indent: Left: 0,79 cm, Hanging: 0,79 cm, No bullets or numbering, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font: Arial

Formatted: Indent: Left: 1,59 cm

Formatted: Font: Times New Roman, 10 pt

Formatted: Indent: Left: 1,59 cm, First line: 0 cm

Formatted: Font: Times New Roman, 10 pt

Formatted: Indent: Left: 1,59 cm, No bullets or numbering, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Indent: Left: 1,59 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font: Times New Roman, 10 pt

Formatted: Indent: Left: 1,59 cm, No bullets or numbering, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Line spacing: 1,5 lines, Pattern: 10%



Ruang lingkup pembahasan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2014 adalah dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 terbagi dalam 117 Sasaran Strategis dengan berorientasi pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama.

5 Prioritas Pembangunan

Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas SDM

Prioritas 2 : Peningkatan daya saing Ekonomi

Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari

Prioritas 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari Korupsi

Prioritas 5 : Pembangunan Politik Hukum dan HAM

Formatted: Line spacing: 1,5 lines